

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI
JAMBI**

Chintia Salzsa Nabiella

NPP 29.0346

*Asal Pendaftaran Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email : salzsanabiella@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : Flood disaster mitigation needs to be done to reduce the risk of flood disasters that occur in Batang Hari Regency. **Purpose** : The implementation of flood disaster mitigation has not been going well, judging from the obstacles that arise. **Method** : The researcher used a qualitative descriptive research method with an inductive approach. The data collection techniques were carried out by means of interviews, observations and documentation and data analysis techniques were carried out by data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Result** : The results showed that the role of the Regional Disaster Management Agency in flood disaster mitigation in terms of policies and strategies had been well planned but in terms of communication, dispute resolution and therapy to the community had not been implemented. **Conclusion** : The advice given by the researcher is to propose BPBD institutions to become echelon II to increase the budget, establish a regional disaster task force consisting of elements of each OPD and improve the quality of human resources to provide education and training to the community.

Keywords: Role, Disaster Mitigation

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP) : Mitigasi bencana banjir perlu dilakukan untuk mengurangi risiko bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Batang Hari. **Tujuan** : Pelaksanaan mitigasi bencana banjir belum berjalan dengan baik dilihat dari hambatan yang muncul. **Metode** : Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Wawancara, Observasi dan Dokumentasi serta teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/ Temuan** : Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana banjir dari sisi kebijakan dan strategi sudah terencana dengan baik namun dari sisi komunikasi, penyelesaian sengketa dan terapi kepada masyarakat belum terlaksana. **Kesimpulan** : Saran yang diberikan peneliti yaitu mengusulkan kelembagaan BPBD menjadi eselon II untuk meningkatkan anggaran, menetapkan satgas bencana daerah yang terdiri dari elemen masing-masing OPD serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Peran, Mitigasi Bencana

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana banjir sudah menjadi masalah umum yang dihadapi Indonesia ketika musim hujan dan melanda rata-rata daerah di seluruh Indonesia. Bencana banjir adalah fenomena dimana keadaan daratan itu lebih rendah daripada permukaan air yang disebabkan dari volume air naik, akibat meluapnya aliran air diatas kapasitas pengairannya oleh curah hujan yang tinggi. Faktor penyebab banjir juga dapat berasal dari ulah manusia. Aktivitas manusia membuat terjadinya banjir seperti pembangunan rumah warga yang dekat dengan aliran air, pembuangan sampah di aliran air, penebangan yang menyebabkan hutan gundul serta tata ruang wilayah yang tidak baik. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah keseluruhan ekosistem yang berisi kumpulan komponen yang berpengaruh satu sama lain dan sensitif terhadap adanya perubahan.

Perubahan ini mengakibatkan apabila satu komponen terganggu maka akan berpengaruh terhadap semua komponen sebagai perilaku alami demi mencapai keseimbangan. DAS terbesar yang berada di pulau Sumatera adalah DAS Batang Hari dengan luas mencapai 4.537.883 ha¹. Kondisi DAS di Batang Hari pada saat ini bisa dikatakan sedang dalam kondisi kritis. Tingkat erosi bisa mencapai 480 ton hektar pertahunnya sehingga kondisi ini dapat berpengaruh hidrologi, sedimentasi dan debit air dari Sungai Batang Hari². Pengelolaan DAS yang tidak tepat, dapat menyebabkan banjir akibat dari erosi yang timbul di bagian hulu dan menyebabkan kualitas air menjadi tidak baik. Kondisi ini juga berdampak di kondisi di hilir sungai dimana sedimentasi material hasil erosi sehingga pendangkalan sungai terjadi dan berpotensi banjir di musim hujan.

Kawasan daerah aliran air merupakan kawasan yang dinamis dan selalu berubah seiring waktu yang berjalan. Akibat dari perubahan di kawasan ini membuat fluktuasi debit air yang disebabkan oleh tingkat presipitasi. Turunnya air hujan pada wilayah di DAS akan mengalami sistem aliran air menuju badan sungai. Kondisi ini nanti akan menimbulkan tingginya debit air yang melebihi kemampuan sungai untuk menampung jumlah air yang masuk sehingga air menuju ke daratan. Akibat dari kurangnya daerah resapan air hujan di daerah permukiman sehingga membuat debit air yang naik langsung menuju daerah permukiman. Paradigma baru penanggulangan bencana yaitu penanganan bencana bersifat preventif yaitu tindakan penanggulangan bencana dilakukan sebelum bencana itu terjadi.

Berbeda dengan paradigma lama yang lebih bersifat responsif yaitu tindakan penanggulangan bencana dilakukan setelah bencana itu terjadi³. Tindakan preventif yang dilakukan dapat membantu mengurangi dampak dari bencana itu yang disebut mitigasi. Upaya dalam meminimalkan dampak dari banjir ini perlu dilakukan beberapa pembangunan, baik fisik maupun sosial agar mampu membentuk masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. Kegiatan mitigasi bencana dapat dilakukan oleh pemerintah meliputi merencanakan dan melaksanakan penataan ruang daerah rawan bencana, membangun infrastruktur serta menata pembangunannya dan pelaksanaan penyebaran informasi ke masyarakat. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang

¹ Sunu Tikno, "Penerapan Metode Penelusuran Banjir (Flood Routing) Untuk Program Pengendalian Dan Sistem Peringatan Dini Banjir Kasus: Sungai Ciliwung," *Jurnal Sains dan Teknologi Modifikasi Cuaca* 3, no. 4 (2002): 2.

² "Banjir Kota Jambi Disebabkan Saluran Air Yang Salah Bangun | Pemerintahan Daerah," accessed September 3, 2021, <https://www.gatra.com/detail/news/369684--Banjir-Kota-Jambi-Disebabkan-Saluran-Air-yang-Salah-Bangun>.

³ Burhanudin Mukhamad Faturahman, "Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik," *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 2 (2018).

Hari Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari menyatakan bahwa BPBD memiliki tanggung jawab dalam menindak lanjuti berbagai hal yang berhubungan dengan bencana. BPBD khususnya menyiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana yang terjadi dan juga menyiapkan tindakan untuk meminimalkan dampak bencana yang rawan terjadi. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Batang Hari memiliki peran dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Mitigasi bencana banjir adalah salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengurangi dampak risiko dari terjadinya banjir. Pelaksanaan mitigasi bencana banjir belum berjalan baik dilihat dari dampak yang ditimbulkan banjir masih besar. Diketahui dampak bencana banjir yaitu jumlah rumah terendam yang terjadi pada tahun 2018 adalah 10.674 KK dan meningkat pada tahun 2021 yaitu 14.096. Terbukti bahwa jumlah rumah terendam ini masih terus meningkat tiap tahunnya. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari menjadi hal utama dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir yakni dengan memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan tugasnya yaitu : kurangnya sosialisasi mitigasi bencana banjir kepada masyarakat, sumber daya aparatur yang membidangi tugas kebencanaan masih kurang, anggaran yang belum memadai dalam penyelenggaraan mitigasi bencana banjir dan standarisasi sarana dan prasarana mitigasi bencana banjir belum memadai.

1.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti mencantumkan 4(empat) hasil penelitian sebelumnya yang memiliki topik berkaitan dan relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian Ayu Anggita Sari, Alifa Asta Sabilla dan Diana Hertati (2020)⁴ yang berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Manajemen Bencana Banjir di Kabupaten Gresik” menunjukkan bahwa Peran BPBD ditetapkan dengan teori legalistic yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berfokus pada tanggap darurat bencana. Penelitian R. Ahmad Buchari (2020)⁵ yang berjudul “Manajemen Mitigasi Bencana dengan Kelembagaan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Garut di Indonesia” menghasilkan bahwa pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana di Kabupaten Garut berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penyelenggaraan bencana serta Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008. Mitigasi bencana di daerah rawan bencana Kabupaten Garut masih belum optimal dikarenakan anggaran yang masih terbatas dari lembaga kebencanaan serta

⁴ Ayu Anggita Sari Diana Hertati, Alifa Asta Sabilla, “Peran BPBD Dalam Manajemen Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik” 2, no. 5 (2020).

⁵ Rd. Ahmad Buchari, “Manajemen Mitigasi Bencana Dengan Kelembagaan Masyarakat Di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Garut Indonesia,” *Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 1.

pemerintah Desa. Penelitian Ninla Elmawati Falabiba (2019)⁶ yang berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang” menunjukkan bahwa BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja BPBD Kabupaten Enrekang. Pelaksanaan penanggulangan risiko bencana banjir berjalan dengan baik, peran kepala pelaksana BPBD Kabupaten Enrekang telah menerapkan prinsip dalam manajemen bencana yang baik. Penelitian Muhammad Fadillah, Dewi Kania Sugiharti, Abi Ma’ruf Radjab (2020)⁷ tentang “Peranan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana” menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan mitigasi bencana Kabupaten Bandung Barat adalah pengaturan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana serta memberikan sosialisasi dan pelatihan. Dalam pelaksanaan mitigasi bencana Kabupaten Bandung Barat masih belum berjalan secara maksimal karena peran pemerintah daerah yang masih kurang berjalan secara semestinya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Batang Hari yang seharusnya memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi sehingga dapat mengurangi dampak risiko bencana banjir yang terjadi, teori yang digunakan menggunakan teori peran Arimbi Hereopoetri dan Mas Achmad Santosa (1993) yaitu peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa dan peran sebagai terapi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Batang Hari, faktor penghambat mitigasi bencana banjir dan upaya mitigasi bencana banjir.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif melalui pendekatan induktif yang bertujuan agar hasil penelitian dapat memberi gambaran secara sistematis dan akurat. Hasil penelitian dijabarkan dalam bentuk laporan penelitian yang disusun dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batang Hari, Sekretaris BPBD Kabupaten Batang Hari, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik dan Masyarakat. Adapun

⁶ Ninla Elmawati Falabiba, “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang” (2019).

⁷ Abi Ma’ruf Radjab Muhammad Fadillah, Dewi Kania Sugiharti, “Peranan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana” 01 (2020).

sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun analisisnya menggunakan teori peran yang digagas oleh Arimbi Hereopoetri dan Mas Achmad Santosa (1993) dengan dimensi yaitu peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa dan peran sebagai terapi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Banjir dalam mitigasi bencana banjir dengan menggunakan teori dari Arimbi Hereopoetri dan Mas Achmad Santosa (1993) dengan dimensi yaitu peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa dan peran sebagai terapi.

3.1 Peran sebagai suatu kebijakan

Peran sebagai suatu kebijakan merupakan seluruh rangkaian konsep dan asas yang tepat agar dijadikan pedoman dan rencana yang akan dilaksanakan dalam melakukan tindakan dalam pekerjaan. Sesuai fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari yaitu perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana maka Badan Penanggulangan Bencana mempunyai peran sebagai suatu kebijakan. Mitigasi adalah suatu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang seolah-olah kegiatan yang dimaksud bencana pada suatu lokasi daerah. Hasil dari mitigasi ini adalah dokumen yang menjadi Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah rawan bencana yang berpedoman kepada Renstra.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari menetapkan kebijakan berdasarkan peraturan yang ada. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah serta pedoman pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). BPBD memiliki tanggung jawab dalam urusan sub program penanggulangan bencana. Pembentukan Renstra diselaraskan dengan RPJMD yang akan disusun menjadi beberapa kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berisikan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan BPBD dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD. Berdasarkan Renstra yang telah disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam mitigasi bencana adalah sebagai berikut

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam upaya mitigasi/pengurangan risiko bencana (PRB) secara terpadu dan menyeluruh antara Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/ Kelurahan, lembaga usaha, masyarakat, akademisi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana dengan mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

			di setiap Kecamatan dan Satuan Pendidikan Aman Bencana serta Relawan Penanggulangan Bencana.
			Peningkatan dukungan atas komitmen Bersama, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama, Kerangka Acuan Kegiatan dan Rencana Kegiatan bersama unsur pentaheliks (pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat dan komunitas)
			Pembentukan UPTD Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan di Kabupaten
			Pembentukan UPTD Pusat Pengendalian Operasi di Kabupaten
			Pembukaan lowongan kerja transparan bagi tenaga CPNS/PPPK(P3K)/PTT yang ditempatkan di BPBD Kabupaten yang sesuai dengan kebutuhan dengan keahlian/kemampuan serta pengalaman bekerja
			Peningkatan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kerja di BPBD Kabupaten

Menilik tabel di atas Renstra tersebut dijadikan pedoman bagi BPBD dalam menetapkan kebijakan yang berisikan program dan kegiatan penanggulangan bencana termasuk mitigasi bencana. Kebijakan mitigasi bencana banjir yang ditetapkan BPBD Kabupaten Batang Hari yaitu membuat peta rawan bencana banjir, memasang sistem peringatan dini di pinggir Sungai Batang Hari, membangun komunitas relawan bencana di desa/kelurahan seluruh Kabupaten Batang Hari, membangun kerja sama dan koordinasi dengan OPD, lembaga usaha dan lembaga pendidikan, menyediakan layanan online sistem informasi kebencanaan, melengkapi sarana dan prasarana serta melaksanakan sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana banjir. BPBD sebagai suatu kebijakan berperan sebagai orang yang menetapkan dan menjalankan kebijakan tersebut. Suatu tujuan dapat dicapai apabila kebijakan itu dijalankan. Kebijakan mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Batang Hari belum dilaksanakan secara merata terutama di daerah terpencil.

3.2 Peran sebagai suatu strategi

Strategi memiliki peran yang sangat penting bagi suatu organisasi dalam proses mencapai tujuannya. Dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan organisasi harus menyiapkan suatu strategi agar lebih terarah dan teratur. Strategi memudahkan dalam mencapai tujuan, karena strategi memberikan arah dalam bertindak dan bagaimana cara dalam bertindak agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga yang mempunyai mandat koordinasi, komando dan pelaksana penanggulangan bencana di daerah. BPBD bersama dukungan dari pemangku kepentingan lainnya juga merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana di Kabupaten Batang Hari.

Strategi adalah langkah-langkah yang terdapat program dalam mencapai visi dan misi. Strategi berisikan pernyataan yang akan menjelaskan bagaimana sasaran itu akan dicapai selanjutnya

dilengkapi dengan serangkaian kebijakan. Berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021-2026 maka tujuan, sasaran, dan strategi sebagai berikut

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Strategi

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana.	<p>Penguatan ketahanan bencana di daerah rawan bencana.</p> <p>Penguatan Kerjasama dengan koordinasi, sinkronisasi dan intergras antar pihak dalam penanggulangan bencana</p> <p>Peningkatan layanan informasi darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinir</p> <p>Penguatan koordinasi dan komando saat penanganan darurat</p> <p>Penguatan SDM di BPBD yang berkualitas, berkompeten dan berintegritas/dedikasi tinggi</p> <p>Penguatan sarana prasarana kerja dilingkup internal BPBD</p>

Menilik dari tabel di atas dijelaskan bahwa strategi dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Strategi yang ditetapkan dimulai dari penguatan ketahanan bencana di daerah rawan bencana, penguatan kerja sama dengan koordinasi dan integrasi antar pihak, peningkatan layanan informasi darurat, penguatan koordinasi dan komando, penguatan SDM di BPBD yang berkualitas, dan penguatan sarana prasarana kerja dilingkup internal BPBD. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, BPBD Kabupaten Batang Hari telah berupaya untuk menerapkan strategi yang telah ditetapkan yaitu strategi mitigasi bencana banjir berbasis masyarakat dengan membentuk komunitas rawan bencana. BPBD Kabupaten Batang Hari telah melakukan beberapa sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk terlibat dalam mitigasi bencana banjir. Peran sebagai suatu strategi adalah bagaimana BPBD Kabupaten Batang Hari dalam mencapai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib mempunyai strategi agar tindakan yang dilakukan lebih terarah. Peran BPBD Kabupaten Batang Hari sebagai suatu strategi telah berjalan dilihat dari pelaksanaan mitigasi bencana berbasis masyarakat berupa sosialisasi dan pelatihan kepada komunitas rawan bencana.

3.3 Peran sebagai alat komunikasi

Pelaksanaan suatu kebijakan tidak lepas dari komunikasi. Komunikasi adalah sarana penyampaian pesan atau informasi yang ditujukan untuk persamaan persepsi dalam mencapai suatu tujuan. Suatu kebijakan tidak terlepas dari keterlibatan para stakeholder yang ikut serta di dalamnya. Stakeholder yaitu orang-orang yang mau berperan dalam penanggulangan bencana untuk berjalannya suatu

kebijakan penanggulangan bencana. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai alat komunikasi dapat dilakukan dengan cara melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder dan masyarakat di dalamnya. Komunikasi akan membentuk koordinasi yang selanjutnya dapat membentuk suatu kerjasama di dalamnya. Pelaksanaan kebijakan akan mudah diterapkan apabila komunikasi berjalan dengan lancar. Komunikasi akan membentuk koordinasi dan kerjasama membantu pelaksanaan mitigasi bencana banjir.

Beberapa sarana dan prasarana yang tidak dapat digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari untuk mitigasi bencana banjir. Dalam mengatasi hal ini BPBD melakukan Kerjasama dengan stakeholder lainnya contohnya adalah dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). BMKG akan membantu BPBD dalam menyampaikan informasi secara update mengenai kondisi daerah. Selanjutnya BPBD Provinsi Jambi dan BMKG juga ikut serta memberikan alat pendeteksi ketinggian air yang diletakkan di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Batin XXIV dan Kecamatan Tembesi. Komunikasi penting dilakukan untuk menjalankan suatu kebijakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya untuk membantu pelaksanaan mitigasi bencana banjir. Koordinasi yang dilakukan dimulai dari perangkat daerah tingkat desa atau kelurahan hingga perangkat daerah tingkat provinsi serta lembaga usaha dan pendidikan. Output yang diharapkan dari adanya koordinasi ini adalah bantuan baik fisik maupun material untuk kelancaran pelaksanaan mitigasi bencana banjir. Komunikasi perlu dilaksanakan untuk memastikan seluruh stakeholder dan masyarakat terlibat dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai alat komunikasi perlu menyampaikan informasi agar seluruh stakeholder dan masyarakat mengetahui tindakan yang dilakukan dalam mitigasi bencana banjir.

3.4 Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

Ditinjau dari hasil yang dicapai atau outcomes, pelaksanaan suatu program dapat dinilai berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan keterlibatan berbagai unsur yang ada di dalamnya. Orang-orang yang terlibat ada yang bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian suatu program. Proses berjalannya suatu program akan memiliki masalah apabila ada yang tidak mendukung berjalannya suatu program. Tujuan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah membangun kepercayaan di masyarakat terhadap BPBD sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam penanggulangan bencana dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu menjadikan perbaikan pelayanan dengan merubah sistem metode manajemen pelayanan. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai alat penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batang Hari. Apabila kepercayaan masyarakat sudah terbentuk maka diharapkan program mitigasi bencana banjir dapat dilaksanakan secara optimal.

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Batang Hari masih harus meningkatkan kepercayaan di masyarakat. Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari di lingkungan masyarakat sebagian direspon positif. Ada sebagian masyarakat yang masih beranggapan bahwa BPBD masih kurang peduli dan hanya memberikan himbauan tanpa ikut serta memberikan solusi dan bantuan kepada masyarakat. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai alat penyelesaian sengketa artinya adalah tindakan yang

dilakukan Badan Penanggulangan Bencana itu dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mitigasi bencana banjir di sekitar masyarakat. Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus diakui oleh masyarakat sehingga timbul rasa percaya masyarakat. Kepercayaan akan membuat masyarakat yakin bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelesaikan masalah yang menghambat pelaksanaan mitigasi bencana banjir. Banyaknya tuntutan masyarakat yang belum diselesaikan membuat masyarakat masih banyak belum mempercayai BPBD Kabupaten Batang Hari.

3.5 Peran sebagai terapi

Peran Badan Penanggulangan Bencana Banjir harus mampu mengajak dan memastikan bahwa masyarakat ikut serta dalam mitigasi bencana banjir. Hal yang dapat dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengajak masyarakat adalah dengan melakukan terapi. Terapi dalam mitigasi bencana banjir dapat dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan cara memberikan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan. Masyarakat yang telah diberikan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan akan dapat mengerti tentang pentingnya mitigasi bencana banjir. Harapannya dapat membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan mitigasi bencana banjir.

BPBD Kabupaten Batang Hari di tahun 2022 akan menyiapkan program yang lebih banyak melibatkan masyarakat. Program ini meliputi dari melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah Kabupaten Batang Hari, memperingati hari kebesaran kesiapsiagaan bencana tanggal 26 April, serta dengan melibatkan masyarakat dalam suatu komunitas bencana. BPBD berharap dengan melibatkan masyarakat dapat membantu pelaksanaan mitigasi bencana banjir agar berjalan secara optimal. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai terapi ini berkaitan dengan kemampuan BPBD dalam mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan mitigasi bencana banjir. Terapi ini dapat dikatakan berhasil dilihat dari partisipasi masyarakat yang ikut serta melaksanakan mitigasi bencana banjir. Terapi juga berfungsi untuk menanamkan kebiasaan dalam mitigasi bencana banjir. Kebiasaan masyarakat Batang Hari yang mayoritas masih melakukan aktivitas di pinggir sungai Batang Hari. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai terapi perlu ditingkatkan dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran yang baik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Batang Hari sangat penting oleh berbagai lapisan masyarakat dalam rangka mengurangi dampak risiko bencana banjir. Banjir sudah menjadi fenomena umum yang terjadi di kawasan DAS. Wilayah-wilayah yang memiliki potensi terjadinya banjir pada umumnya berada di sepanjang aliran sungai. Peneliti menemukan temuan penting yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas dengan cukup baik dikarenakan adanya koordinasi yang baik dengan pemerintah tentang penyediaan infrastruktur mitigasi bencana banjir, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terkait mitigasi bencana banjir. Sama halnya dengan temuan Muhammad Fadillah, Dewi Kania Sugiharti dan Abi Ma'ruf Radjab bahwa dalam melaksanakan mitigasi bencana banjir maka peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus berjalan agar mitigasi bencana banjir dapat terlaksana dengan baik.

Layaknya program lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari ini juga memiliki beberapa kekurangan yaitu sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat yang

masih kurang, sumber daya aparatur yang membidangi tugas kebencanaan masih kurang, anggaran yang belum memadai dalam penyelenggaraan mitigasi bencana banjir dan standarisasi peralatan penanggulangan bencana yang belum memadai. Adanya Renstra Badan Penanggulangan Bencana daerah diharapkan mampu memudahkan dalam mengurangi dampak risiko bencana banjir sehingga perekonomian dan kehidupan masyarakat tidak terganggu dan dapat berjalan dengan semestinya.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Batang Hari yaitu kebiasaan masyarakat Kabupaten Batang Hari yang hidup dan beraktifitas di bantaran sungai sehingga masyarakat memilih tinggal di bantaran sungai dan menjadikan lahan di darat sebagai lahan perkebunan kelapa sawit dan karet.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa mitigasi bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari dikatakan belum terlaksana dengan baik, karena dalam pelaksanaan program masih ada yang belum sesuai dengan harapan karena masih terdapat hambatan dan masalah. Faktor penghambat dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir yaitu sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat yang masih kurang, sumber daya aparatur yang membidangi tugas kebencanaan masih kurang, anggaran yang belum memadai dalam penyelenggaraan mitigasi bencana banjir dan standarisasi peralatan penanggulangan bencana yang belum memadai. Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana banjir yaitu meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, pemenuhan sarana dan prasarana dan mengajukan proposal bantuan kepada badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah provinsi. Peneliti menyarankan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengusulkan kelembagaan BPBD Kabupaten Batang Hari menjadi badan/dinas (eselon II), menetapkan satgas bencana daerah Kabupaten Batang Hari yang anggotanya terdiri dari elemen-elemen satgas dari masing-masing OPD terkait, instansi vertikal dan segenap unsur pentaheliks sehingga masing-masing Dinas/Instansi siap menghadapi bencana, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang membidangi tugas kebencanaan.

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kecamatan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori peran oleh Arimbi Hereopoetri dan Mas Achmad Santosa.

Arah Masa Depan (*future work*). Peneliti menyadari masih kurangnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Batang Hari untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

4.1 Buku-buku

Ari Sandhyaviri dkk (2015). Mitigasi Bencana Banjir Dan Kebakaran Hutan. Universitas Riau Press.

Heroepoetri, Arimbi dan Mas Achmad Santosa. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan. Jakarta, 1993.

Sugiyono. (2008) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV

Suhardono, Edi. (2018). Teori Peran. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta, CV.

4.2 Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari

4.3 Jurnal

Buchari, Rd. Ahmad. "Manajemen Mitigasi Bencana Dengan Kelembagaan Masyarakat Di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Garut Indonesia." *Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 1.

Diana Hertati, Alifa Asta Sabilla, Ayu Anggita Sari. "Peran BPBD Dalam Manajemen Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik" 2, no. 5 (2020).

Faturahman, Burhanudin Mukhamad. "Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik." *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 2 (2018).

Muhammad Fadillah, Dewi Kania Sugiharti, Abi Ma'ruf Radjab. "Peranan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana" 01 (2020).

Ninla Elmawati Falabiba. "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang" (2019).

Tikno, Sunu. "Penerapan Metode Penelusuran Banjir (Flood Routing) Untuk Program

Pengendalian Dan Sistem Peringatan Dini Banjir Kasus: Sungai Ciliwung.” *Jurnal Sains dan Teknologi Modifikasi Cuaca* 3, no. 4 (2002): 2.

4.4 Sumber Lain

“Banjir Kota Jambi Disebabkan Saluran Air Yang Salah Bangun | Pemerintahan Daerah.” Accessed September 3, 2021. <https://www.gatra.com/detail/news/369684--Banjir-Kota-Jambi-Disebabkan-Saluran-Air-yang-Salah-Bangun>.

